DAFTAR PUSTAKA

Asrida, Asnawi, dan Syaikhul, Fallah. 2018. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* .Vol.3.No.1.pp 1-16.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018. (https://www.bpk.go.id/) . Diakses 7 Mei 2020.

Binus. (2015). *Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Kegiatan Pembelian dan Tata Kelola Persediaan.* Diakses April 14, 2020, dari https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2015_1_1027_Bab2.pdf

BPK. (2020, Maret 9). *SERTIJAB KEPALA PERWAKILAN SUMSEL, ANGGOTA V BPK RI MINTA TETAP JAGA INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME*. Diakses Maret 25, 2020, dari https://palembang.bpk.go.id/?p=29123

Cooper, D. R, dan Pamela, Schindler. 2017. *Metode Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: Salemba Empat.

Efen, P. (2018, September 14). *BPK Temukan 5 Permasalahan di Palembang*. Diakses Januari 25, 2020, dari https://www.detiksumsel.com/bpk-temukan-5-permasalahan-di-palembang/

Fauzi, Achmad. 2018. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang". *Jurnal Riset Akuntansi* .pp 1-16.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

H. Bahdin Nur Tanjung, S. M. (2019). *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH(Proposal, Skripsi, dan Tesis) Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah.* Medan: PRENADAMEDIA GRUP (Divisi Kencana).

Halim, Abdullah, dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* . Jakarta: Salemba Empat.

Hardiningsih, Meita, Srimindarti, dan Ida, Kristiana. 2019. “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang)”. *Jurnal AKTSAR* Vol.2 No. 1,21 - 42. pp 21-42.

Hehanussa, Salomi. J. 2015. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dearah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting and Management* . Vol 2. No 1. pp 82-90.

Lewier, Christy N dan Ch. Heni. 2016. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten". *Skripsi*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Mada, Kalangi, dan Gamaliel. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Komitmen Organisasi Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ". *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol 8. No 2. Pp 106-115.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi

Nurlaili. 2016. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)". *Jurnal JOM Fekon*.Vol.3 No.1. pp 449-461.

Palembang, K. (2018, Juli 17). *Info Perkara Pidana Khusus*. Diakses Maret 9, 2020, dari http://kejaripalembang.com/index.php?md=ct&id=24

Panamon, Irene F. 2014. "Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Manado". *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 9 No. 2. Pp 68-80.

Priyatno, Duwi. 2018. *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum.* Yogyakarta: Andi.

Saragih, Charli Andreas. 2015. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun". *Jurnal JOM Fekon.* Vol.2 No.2. pp 1-16.

Sari, Embun W. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu". *Jurnal JOM Fekon* Vol. 4 No. 1. pp 571-588.

Somad, Abdus. 2016. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* . Hal 1-20.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Widiyanti, Arista. 2016. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pasuruan”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Widiyatama, Arif, Lola N, dan Diahrespati. 2017. “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Berkala Aakuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 02 No.02. pp 1-20.

Wiyana, Anim dan Anna Sutrisna. 2016. "Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS*. pp 313-322.

Yudianto, Ivan dan Ekasari Sugiarti. 2016. “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Krawang”. *Skripsi*. Universitas Padjadjaran. Bandung

Peraturan Pemerintah :

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaam Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah